

BAB II

GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai gambaran umum *International Organization for Migration*, *human trafficking* dan situasi *human trafficking* di Thailand. Seperti yang telah diketahui, perdagangan manusia merupakan permasalahan yang sulit untuk dituntaskan bersih. Hanya saja, angka dari peningkatan perdagangan manusia dapat ditekan dengan pergerakan yang dilakukan oleh pemerintah atau organisasi-organisasi yang berfokus pada perdagangan manusia – meskipun tetap, kenaikan dan penurunan angka perdagangan manusia tidak dapat diprediksi. Sebagai organisasi internasional yang ikut serta dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia, IOM memiliki tujuan untuk dapat memberikan layanan dan berperan aktif dalam penanganan masalah tersebut. IOM juga memiliki kerja sama dengan pemerintah Thailand dalam mengatasi perdagangan manusia. Hal tersebut dapat membantu masyarakat yang terkena perdagangan manusia ataupun membantu pemerintah Thailand dalam mengatasi permasalahan tersebut. IOM telah berperan aktif dalam membantu Thailand menangani permasalahan perdagangan manusia. Melalui berbagai program dan inisiatif, IOM bekerja sama dengan pemerintah Thailand untuk meningkatkan kapasitas dalam pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum terkait perdagangan manusia. Upaya ini mencakup pelatihan bagi aparat

penegak hukum, kampanye kesadaran publik, serta penyediaan layanan dukungan bagi korban (Afriyani, 2024).

2.1 *International Organization for Migration (IOM)*

International Organization for Migration (IOM) adalah organisasi antarpemerintah terkemuka yang didirikan pada tahun 1951 yang bertujuan untuk mempromosikan tata kelola migrasi yang tertib, aman, manusiawi, dan bermartabat. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan layanan jasa dan nasihat kepada negara dan para migran (Nuzula, 2019). Komitmen yang diberikan IOM kepada negara dan masyarakat berharap dapat membantu ketertiban dan memberikan manfaat yang baik.

Pada tahun 2016, IOM menjadi bagian dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). IOM berperan aktif dalam memberikan dukungan teknis, operasional, dan kebijakan kepada negara-negara anggota dalam menangani berbagai tantangan migrasi, termasuk perdagangan manusia. Dengan kehadirannya di lebih dari 100 negara, IOM memiliki program-program strategis yang mencakup pencegahan human trafficking, perlindungan korban, dan rehabilitasi melalui pendekatan kemitraan multi-aktor yang inovatif (IOM, 2023).

2.1.1 Sejarah IOM

International Organization for Migration (IOM) didirikan pasca perang dunia kedua, yang mana banyak orang yang kehilangan tempat tinggal serta membutuhkan bantuan – maka dari itu, orang-

orang tersebut bermigrasi untuk mendapatkan keamanan di negara lain. Pada tahun 1951, IOM sendiri diprakarsai oleh Belgia dan Amerika Serikat dengan nama awal *Provisional Intergovernmental Committee for The Movement of Migrants from Europe* (PICMME) (IOM, 2023). Tak lama kemudian, PICMME berganti nama menjadi ICEM (*Intergovernmental Committee for European Migration*). Pada tahun 1980, ICEM mendapat penghargaan atas peran dan fungsinya dalam mengatasi masalah pengungsian dan berganti nama menjadi *Intergovernmental Committee for Migration* (ICM). Kemudian pada tahun 1989, ICM berganti nama seperti sekarang yang dikenal dengan *International Organization for Migration* (IOM) (Diah, 2014).

Seiring perkembangan isu migrasi global, IOM memperluas fokusnya dari sekadar pemindahan pengungsi menjadi menangani berbagai aspek migrasi, termasuk migrasi tenaga kerja, migrasi akibat perubahan iklim, dan pencegahan perdagangan manusia (Betts, 2011). Pada dekade 1990-an, IOM mulai mengembangkan program-program untuk memberikan perlindungan kepada migran yang rentan, memperkuat kebijakan tata kelola migrasi di negara-negara anggota, serta mempromosikan kerja sama internasional (IOM, 2023). Organisasi ini juga mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam seluruh kegiatannya, menempatkan migrasi sebagai bagian integral dari pembangunan global (IOM, 2023).

Pada 19 September 2016, IOM secara resmi menjadi ‘organisasi terkait’ PBB melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 2016). Perubahan status ini memperkuat peran IOM sebagai aktor utama dalam tata kelola migrasi global, termasuk kontribusinya terhadap implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (IOM, 2023). Sebagai organisasi yang tetap independen secara operasional dan finansial, IOM kini memiliki lebih dari 175 negara anggota dan aktif dalam lebih dari 100 negara (United Nations, 2016). Peran pentingnya dalam menangani isu perdagangan manusia, pengungsi, dan migrasi paksa menjadikan IOM salah satu organisasi yang paling berpengaruh di bidang migrasi internasional (IOM, 2023).

2.1.2 Tugas IOM

Dalam menjalankan perannya untuk mengatasi masalah keimigrasian, IOM memiliki beberapa tugas yakni yang pertama, *International Organization for Migration (IOM)* berperan penting dalam mengelola dan mempromosikan tata kelola migrasi yang tertib, aman, manusiawi, dan bermartabat. Sebagai organisasi antar-pemerintah terkemuka di bidang migrasi, IOM bekerja sama dengan pemerintah dan mitra internasional untuk merumuskan kebijakan migrasi yang efektif dan berbasis bukti. Selain itu, IOM menyediakan bantuan teknis dan penguatan kapasitas bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola migrasi

secara holistik. Upaya ini mencakup pengembangan kerangka hukum dan institusional yang mendukung migrasi yang teratur dan perlindungan hak-hak migran. Melalui pendekatan ini, IOM berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan global dengan memastikan bahwa migrasi dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Geiger, 2018).

Selanjutnya kedua, IOM berperan signifikan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang rentan, termasuk pengungsi, pencari suaka, korban perdagangan manusia, dan mereka yang terdampak bencana alam atau konflik. IOM menyediakan perlindungan dan bantuan melalui pengelolaan kamp pengungsi, evakuasi darurat, serta fasilitasi pemulangan sukarela yang aman dan bermartabat. Di Indonesia, IOM telah aktif berkontribusi dalam upaya memerangi perdagangan manusia dengan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, serta menyediakan bantuan pemulangan dan pemulihan. Kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lokal memperkuat efektivitas program-program ini, memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik migran yang rentan (Ramadhani, 2023).

Ketiga, IOM berperan sebagai platform dialog dan kerja sama antarnegara dalam isu migrasi. IOM membantu negara-negara anggota merumuskan kebijakan migrasi yang komprehensif dan

mendukung kerja sama lintas batas. Peran ini menempatkan IOM sebagai pemimpin dan penentu standar dalam pengelolaan migrasi global, dengan dampak yang melampaui sistem antarnegara tradisional. IOM menjalin hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah dan jaringan migran transnasional, untuk memastikan bahwa kebijakan migrasi mencerminkan realitas sosial dan geografis dunia. Pendekatan ini memungkinkan IOM berkontribusi pada stabilitas dan kesejahteraan global dengan memastikan migrasi dikelola secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Geiger, 2018).

Keempat, IOM memainkan peran krusial dalam mendukung migrasi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Sebagai organisasi antar-pemerintah yang mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur, melalui berbagai intervensi yang menghubungkan bantuan kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan IOM berperan kunci dalam mencapai Agenda 2030. Di Indonesia sendiri, IOM mendukung migran melalui kegiatan pemukiman kembali, dukungan, dan perlindungan. Pendekatan ini memastikan bahwa migrasi tidak hanya dikelola secara efektif tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi migran serta komunitas asal dan tujuan mereka. Dengan mengintegrasikan migrasi ke dalam strategi pembangunan nasional dan internasional, IOM berkontribusi pada pengurangan kemiskinan, peningkatan

kesejahteraan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan secara global (IOM, 2024).

2.1.3 Program-program IOM terkait *human trafficking*

Dalam mengimplementasikan tugas tersebut, IOM memiliki program-program untuk menyelesaikan permasalahan dalam kurun waktu tertentu. Program dari IOM antara lain, pertama Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR), merupakan salah satu program unggulan *International Organization for Migration* (IOM) yang bertujuan untuk membantu migran yang ingin kembali ke negara asal mereka secara sukarela. Program ini dirancang untuk memberikan solusi yang manusiawi bagi migran yang berada dalam situasi sulit, seperti mereka yang tidak memiliki izin tinggal atau tidak mampu melanjutkan hidup di negara tempat mereka berada. IOM menyediakan berbagai bentuk dukungan, termasuk logistik untuk perjalanan pulang, bantuan psikososial untuk mendukung pemulihan mental, serta program reintegrasi yang mencakup pelatihan keterampilan atau bantuan ekonomi. Melalui AVRR, IOM memastikan bahwa proses kepulangan dilakukan dengan aman dan bermartabat, sekaligus membantu para migran beradaptasi kembali di komunitas asal mereka dengan peluang yang lebih baik. Program ini tidak hanya membantu individu tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi di negara asal migran (IOM, 2024).

Kedua, Counter-Trafficking Initiatives, program penting yang dijalankan oleh *International Organization for Migration* (IOM) untuk menangani dan mencegah perdagangan manusia secara komprehensif. IOM aktif melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan bahaya perdagangan manusia, terutama di komunitas rentan. Selain itu, IOM juga memberikan pelatihan kepada penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kapasitas dalam mengidentifikasi korban, menyelidiki kasus, dan menuntut pelaku perdagangan manusia. Sebagai bagian dari pendekatannya, IOM menyediakan layanan perlindungan bagi para korban, termasuk rehabilitasi psikososial, perawatan medis, dan reintegrasi sosial-ekonomi. Program ini dirancang untuk mengurangi insiden perdagangan manusia secara global sambil memberikan dukungan yang signifikan bagi korban untuk memulai kembali kehidupan mereka dengan aman dan bermartabat (IOM, 2024).

Ketiga yakni Migration Health Assessments and Travel Health Assistance, merupakan layanan yang disediakan oleh *International Organization for Migration* (IOM) untuk memastikan migran dapat berpindah secara aman dan sehat. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan, yang dirancang untuk mendeteksi dan menangani kondisi kesehatan yang dapat memengaruhi migrasi mereka atau kepatuhan terhadap persyaratan negara tujuan. Selain itu,

IOM juga memberikan bantuan kesehatan selama perjalanan untuk memastikan migran tetap dalam kondisi optimal hingga tiba di tempat tujuan. Program ini tidak hanya melindungi kesehatan individu migran tetapi juga membantu menjaga kesehatan masyarakat di negara penerima, dengan memastikan bahwa standar kesehatan internasional dipenuhi. Upaya ini mencerminkan komitmen IOM terhadap tata kelola migrasi yang manusiawi, aman, dan tertib (IOM, 2024).

Keempat, Emergency Response and Humanitarian Assistance adalah salah satu program utama *International Organization for Migration* (IOM) yang bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan kepada populasi yang terdampak oleh krisis, seperti konflik, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. IOM berperan penting dalam mendukung pengungsi dan orang-orang yang terlantar dengan menyediakan tempat tinggal darurat yang aman dan layak, serta mendistribusikan bantuan non-makanan seperti perlengkapan kebersihan, selimut, dan pakaian. Selain itu, IOM juga memberikan dukungan logistik, termasuk pengangkutan barang bantuan dan pengelolaan fasilitas transit bagi pengungsi. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban krisis sekaligus mendukung stabilisasi kondisi masyarakat terdampak dalam jangka pendek hingga jangka panjang (IOM, 2024).

Kelima yakni Labour Migration Programs, merupakan inisiatif *International Organization for Migration* (IOM) yang dirancang untuk memfasilitasi migrasi tenaga kerja yang legal, aman, dan etis. Dalam program ini, IOM bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa migrasi tenaga kerja memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Program ini mencakup pelatihan pra-keberangkatan, yang memberikan informasi dan keterampilan kepada calon pekerja migran untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di negara tujuan. Selain itu, IOM mempromosikan perlindungan hak-hak pekerja migran melalui advokasi kebijakan, peningkatan kapasitas institusi, dan penguatan mekanisme perlindungan tenaga kerja. Upaya lainnya termasuk mendorong praktik perekrutan yang adil dan transparan untuk mengurangi risiko eksploitasi. Program ini tidak hanya membantu pekerja migran tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi di negara asal dan tujuan.

Keenam Resettlement Support adalah program penting dari *International Organization for Migration* (IOM) yang dirancang untuk membantu pengungsi yang memenuhi syarat untuk pemukiman kembali di negara ketiga. Program ini bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang bagi mereka yang tidak dapat kembali ke negara asal atau menetap di negara tempat mereka pertama kali berlindung. IOM menyediakan berbagai layanan untuk mendukung proses ini,

termasuk wawancara mendalam untuk memastikan kelayakan pemukiman kembali, pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik pengungsi memenuhi persyaratan negara tujuan, serta orientasi budaya untuk mempersiapkan mereka beradaptasi dengan lingkungan baru. Selain itu, IOM juga mengatur perjalanan dengan aman dan manusiawi, sehingga pengungsi dapat memulai kehidupan baru dengan peluang yang lebih baik. Program ini mencerminkan komitmen IOM terhadap perlindungan pengungsi dan pengelolaan migrasi yang bermartabat.

Ketujuh, Capacity-Building and Technical Assistance adalah program yang dijalankan oleh *International Organization for Migration* (IOM) untuk memperkuat kapasitas pemerintah dan organisasi mitra dalam mengelola migrasi secara efektif dan berkelanjutan. Program ini mencakup pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keahlian teknis para pemangku kepentingan dalam berbagai aspek migrasi, termasuk pengembangan kebijakan yang berbasis data, pengelolaan perbatasan yang aman dan efisien, serta penerapan sistem informasi migrasi yang canggih. Dengan menyediakan bantuan teknis, IOM membantu negara-negara anggota meningkatkan infrastruktur kelembagaan mereka dalam menangani tantangan migrasi, seperti perdagangan manusia, migrasi tenaga kerja, dan pengungsi. Melalui pendekatan kolaboratif ini, IOM memastikan

bahwa tata kelola migrasi tidak hanya efisien tetapi juga manusiawi dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (IOM, 2024).

Program-program tersebut mencerminkan komitmen IOM dalam mendukung migrasi yang aman dan tertib, serta melindungi hak dan kesejahteraan migran di seluruh dunia. Sebagai organisasi yang berdedikasi untuk mengelola migrasi secara tertib, aman, manusiawi, dan bermartabat, *International Organization for Migration* (IOM) memainkan peran penting dalam menjawab tantangan global terkait migrasi. Melalui program-program inovatif seperti resettlement support, emergency response, labour migration programs, dan capacity-building, IOM tidak hanya memberikan solusi praktis tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang mendukung kesejahteraan migran dan stabilitas komunitas yang terlibat. Dengan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta, IOM membangun sistem migrasi yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tujuan pembangunan global. Upaya ini menunjukkan komitmen IOM dalam memastikan bahwa migrasi menjadi kekuatan positif bagi individu dan masyarakat di seluruh dunia.

2.2 Human Trafficking

Human trafficking atau perdagangan manusia, sebagaimana didefinisikan dalam **Protokol Palermo dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**, mencakup aktivitas seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu. Aktivitas ini dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, berbagai bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau situasi rentan. Selain itu, aktivitas tersebut juga dapat melibatkan pemberian atau penerimaan bayaran maupun keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas individu lainnya. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk eksploitasi, yang dapat berupa eksploitasi dalam prostitusi, kerja paksa, pelayanan paksa, perbudakan, praktik serupa, atau bahkan pengambilan organ tubuh. (Wulandari dan Wicaksono, 2014).

Menurut para ahli, perdagangan manusia melibatkan proses kompleks yang mencakup tiga elemen utama: tindakan (seperti perekrutan atau pengangkutan), sarana (seperti ancaman atau penipuan), dan tujuan (yaitu eksploitasi). Sebagai ilustrasi, Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa perdagangan manusia merupakan tindak kejahatan yang mencakup perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan individu dengan menggunakan metode seperti ancaman, kekerasan, atau berbagai bentuk pemaksaan lainnya, yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi. (Novianti, 2014).

Di Indonesia, definisi perdagangan orang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan cara menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran maupun keuntungan. Tindakan tersebut bertujuan memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas individu tersebut, baik dalam skala domestik maupun antarnegara, untuk eksploitasi atau yang mengakibatkan individu tersebut tereksplotasi. (Wulandari dan Wicaksono, 2014).

2.2.1 Jenis-jenis *human trafficking*

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan domestik, perdagangan organ, dan perkawinan paksa. Setiap jenis perdagangan manusia memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda, namun semuanya melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi korban. Memahami berbagai jenis perdagangan manusia ini penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif. Berikut adalah beberapa jenis perdagangan manusia beserta penjelasannya.

Eksplorasi seksual dalam konteks perdagangan manusia merujuk pada tindakan di mana individu, terutama perempuan dan anak-anak, dipaksa atau diperdaya untuk terlibat dalam aktivitas seksual komersial tanpa persetujuan mereka. Praktik ini mencakup berbagai bentuk, seperti prostitusi paksa, pornografi, dan bentuk lain dari perbudakan seksual. Korban sering kali direkrut melalui penipuan, ancaman, atau kekerasan, dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi baik secara domestik maupun lintas negara (Wulandari dan Wicaksono, 2014). Berdasarkan data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), sekitar 50% dari kasus perdagangan manusia yang teridentifikasi pada tahun 2018 ditujukan untuk eksploitasi seksual (Databoks, 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa eksploitasi seksual tetap menjadi bentuk utama dari perdagangan manusia, memerlukan perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak untuk memberantasnya.

Kerja paksa dalam konteks perdagangan manusia mengacu pada kondisi di mana seseorang dipaksa untuk bekerja di bawah ancaman kekerasan, penipuan, atau bentuk paksaan lainnya tanpa persetujuan mereka. Korban sering kali terjebak utang atau tergiur oleh janji pekerjaan yang layak, tetapi pada akhirnya dieksploitasi dalam lingkungan kerja yang tidak manusiawi. Menurut *International Labour Organization (ILO)*, pada tahun 2016 terdapat sekitar 24,9 juta orang menjadi korban kerja paksa di seluruh dunia. Dari jumlah

tersebut, 16 juta individu dieksploitasi di sektor swasta seperti konstruksi, manufaktur, dan pertanian. Kondisi ini mencerminkan bahwa kerja paksa tetap menjadi tantangan besar dalam perdagangan manusia, membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk memberantasnya (ILO, 2015). Selain itu, korban sering terjebak dalam lingkungan kerja yang buruk tanpa kebebasan untuk keluar dari pekerjaan tersebut (Makhfudz, 2013).

Perbudakan domestik dalam perdagangan manusia merujuk pada situasi di mana individu, terutama perempuan dan anak-anak, dipaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa kebebasan atau kompensasi yang layak. Korban biasanya direkrut melalui penipuan atau paksaan, lalu dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, seperti jam kerja berlebihan, upah yang sangat rendah atau tidak dibayar sama sekali, serta mengalami kekerasan fisik dan psikologis. Identitas korban sering disita oleh majikan, sehingga mereka sulit melarikan diri atau mencari bantuan. Berdasarkan laporan *International Labour Organization (ILO)* tahun 2021, sekitar 49,6 juta orang hidup dalam perbudakan modern, dengan 27,6 juta di antaranya menjadi korban kerja paksa, termasuk perbudakan domestik (Pangestika dan Restanto, 2023). Situasi ini menyoroti pentingnya upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia untuk mengatasi perbudakan domestik dalam perdagangan manusia.

Perdagangan organ dalam konteks perdagangan manusia merujuk pada praktik ilegal di mana individu diperdagangkan dengan tujuan pengambilan organ tubuh mereka untuk dijual atau ditransplantasikan secara komersial. Korban sering kali direkrut melalui penipuan, paksaan, atau eksploitasi kerentanan ekonomi, dan dipaksa atau dibujuk untuk menyerahkan organ vital seperti ginjal, hati, atau jantung. Praktik ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan serius bagi korban, termasuk komplikasi medis dan kematian. Menurut laporan yang berjudul **"Perdagangan Organ Tubuh Manusia: Ketidakadilan Kemanusiaan dan Dampak Sosialnya"** yang dipublikasikan dalam **Jurnal Ilmu Kepolisian**, perdagangan organ manusia merupakan isu serius yang merusak prinsip-prinsip kemanusiaan. Masalah ini memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap individu yang terlibat, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan dan sistem kesehatan. (Fahrur, 2023). Situasi ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat dan kerja sama internasional untuk memberantas perdagangan organ dalam perdagangan manusia.

Perkawinan paksa merupakan salah satu bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia, di mana individu, terutama perempuan dan anak-anak, dipaksa menikah tanpa persetujuan mereka. Praktik ini sering kali melibatkan ancaman, kekerasan, atau penipuan, dan dapat

terjadi lintas negara maupun dalam satu negara. Korban perkawinan paksa sering kali mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, serta kehilangan hak-hak dasar mereka (Satriani dan Muis, 2022). Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2021, sekitar 22 juta orang hidup dalam perkawinan paksa, yang merupakan bagian dari perbudakan modern. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan mayoritas dari korban perkawinan paksa.

2.2.2 Dampak yang ditimbulkan dari adanya *human trafficking*

Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan transnasional yang memiliki dampak multidimensional terhadap individu, masyarakat, dan negara. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan penderitaan mendalam bagi para korban yang mengalami eksploitasi fisik dan psikologis, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi di berbagai wilayah. Aktivitas perdagangan manusia sering kali didukung oleh jaringan kriminal yang kuat, menciptakan tantangan besar bagi sistem hukum dan keamanan nasional. Selain itu, dampaknya yang meluas ke bidang kesehatan, psikologi, dan stabilitas ekonomi menunjukkan urgensi penanganan menyeluruh terhadap isu ini, baik di tingkat lokal maupun global (Makhfudz, 2013).

Perdagangan manusia menyebabkan kerusakan serius pada struktur sosial masyarakat. Korban perdagangan manusia sering mengalami keterasingan dari komunitas dan keluarga mereka, yang menciptakan trauma sosial yang mendalam. Selain itu, perdagangan manusia memperburuk ketidaksetaraan gender dan merusak norma sosial, terutama karena banyak korban yang dieksploitasi secara seksual atau dalam pekerjaan yang tidak manusiawi. Masyarakat yang terkena dampak juga kehilangan rasa aman karena maraknya praktik ilegal ini yang melibatkan jaringan kriminal internasional (Nuraeny, 2024).

Perdagangan manusia berdampak negatif terhadap ekonomi lokal dan global. Banyak korban yang kehilangan kesempatan untuk berkontribusi secara produktif dalam ekonomi formal karena terjebak dalam pekerjaan paksa atau eksploitasi. Di sisi lain, aktivitas ilegal ini menciptakan pasar gelap yang merugikan pendapatan negara dari pajak dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Biaya untuk rehabilitasi korban dan penegakan hukum juga menjadi beban finansial tambahan bagi negara-negara terdampak (Satriani dan Muis, 2013).

Korban perdagangan manusia sering menghadapi trauma jangka panjang, termasuk depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), dan kehilangan kepercayaan diri. Mereka juga mengalami

dampak psikologis akibat pelecehan, kekerasan, dan eksploitasi yang dialami selama perdagangan. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban sering memperburuk kondisi psikologis mereka, sehingga mereka sulit kembali ke kehidupan normal. Korban perdagangan manusia sering menghadapi masalah kesehatan serius, termasuk penyakit menular seksual (PMS), cedera fisik, dan malnutrisi akibat kondisi kerja atau eksploitasi yang buruk. Kurangnya akses ke perawatan medis yang memadai memperburuk situasi ini, terutama bagi korban yang berada dalam perbudakan atau kerja paksa. Selain itu, eksploitasi yang terjadi sering kali menyebabkan korban menderita penyakit mental dan fisik kronis (Nuraeny, 2024).

Perdagangan manusia memperburuk tantangan keamanan dan hukum di berbagai negara. Aktivitas ini sering dikaitkan dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti pencucian uang, perdagangan narkoba, dan korupsi. Hal ini melemahkan otoritas hukum dan mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, ketidakmampuan pemerintah untuk menanggulangi perdagangan manusia secara efektif sering menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal (Satriani dan Muis, 2013).

2.3 Situasi *Human Trafficking* di Thailand

2.3.1 Data terkini tentang human trafficking di Thailand (korban, pelaku, pola).

Perdagangan manusia di Thailand tetap menjadi isu serius dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, pemerintah Thailand melaporkan peningkatan anggaran untuk upaya penanggulangan perdagangan manusia, dengan alokasi sebesar 3.641,98 juta baht (sekitar 114,96 juta USD) untuk tahun fiskal 2018, yang meningkat pada tahun 2019. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi perdagangan manusia (Royal Thai Government's, 2019).

Pemerintah Thailand melaporkan bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan signifikan dalam penegakan hukum terkait perdagangan manusia. Terdapat 253 kasus yang diselidiki, 308 tersangka yang dituntut, dan 249 pelaku yang dihukum. Selain itu, pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan aset senilai sekitar 80,13 juta baht (2,32 juta USD) dalam kasus-kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh Kantor Anti Pencucian Uang (U.S Department of State, 2023).

Pada tahun 2023, pemerintah Thailand melaporkan peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia yang diinisiasi, dengan total 312 kasus, meningkat dari 253 kasus pada tahun 2022.

Peningkatan ini merupakan hasil dari upaya kolektif jaringan advokasi komunitas dalam melaporkan informasi dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam memeriksa basis data elektronik. Selain itu, pemerintah juga melaporkan bahwa 22 pejabat yang terlibat dalam perdagangan manusia telah dituntut pada tahun 2023 (Royal Thai Government's, 2023).

2.3.2 Faktor-faktor penyebab tingginya angka human trafficking di Thailand

Tingginya angka human trafficking menjadi kekhawatiran bagi negara dan masyarakat. Perlu diketahui bahwa tingginya angka tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, posisi geografis strategis, yang mana Thailand ini menjadi pusat transit dan tujuan perdagangan manusia. Thailand terletak di jantung Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar, Laos, Kamboja, dan Malaysia, menjadikannya jalur transit utama untuk perdagangan manusia. Posisi ini memudahkan pergerakan orang, baik secara legal maupun ilegal, dari negara-negara tetangga. Akses perbatasan barat yang panjang dan porositas perbatasan memungkinkan masuknya migran ilegal, yang sering kali rentan dieksploitasi (Omega dkk, 2023).

Kedua yakni mengenai perekonomian dan tingginya permintaan tenaga kerja murah. Adanya kesenjangan ekonomi di Thailand ini bisa dilihat dengan negara-negara tetangga seperti

Myanmar, Laos, dan Kamboja memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan Thailand. Warga negara dari negara-negara ini bermigrasi ke Thailand untuk mencari pekerjaan, tetapi seringkali menjadi korban perdagangan manusia. Maka dari itu, karna tingginya banyak permintaan tenaga kerja murah banyak migran menggunakan jasa perantara ilegal untuk masuk ke Thailand, yang kemudian mengeksploitasi mereka (Ruthrline, 2016). Industri perikanan Thailand merupakan salah satu eksportir hasil laut terbesar di dunia. Industri ini sering mempekerjakan tenaga kerja migran secara paksa atau dengan kondisi yang tidak manusiawi. Sedangkan di sektor konstruksi, pertanian, dan domestik kerap memanfaatkan pekerja murah, yang sering kali datang dari negara tetangga melalui jalur ilegal (Arby, 2020).

Ketiga, permintaan di industri seksual, industri seksual di Thailand menjadi salah satu sektor yang rentan terhadap praktik perdagangan manusia. Meskipun prostitusi secara resmi ilegal, industri ini tetap berkembang pesat dan menjadi daya tarik bagi wisatawan internasional. Kondisi ini menciptakan permintaan tinggi akan pekerja seks, yang sering kali dipenuhi melalui praktik perdagangan manusia. Banyak korban, termasuk perempuan dan anak-anak, direkrut atau dipaksa masuk ke dalam industri ini melalui penipuan, pemaksaan, atau eksploitasi kerentanan ekonomi mereka. Menurut data *International Labour Organization* (ILO), pada tahun

1999 diperkirakan sekitar 80.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan ke dalam industri seks komersial di Thailand, dengan sekitar 30% di antaranya berusia di bawah 18 tahun. Diketahui bahwa Thailand sebagai destinasi pariwisata seksual yang memiliki permintaan yang tinggi. Permintaan ini dipenuhi baik legal maupun ilegal, memicu perdagangan manusia, termasuk eksploitasi anak-anak. Dalam hal ini, banyak korban wanita dan anak-anak migran sering kali dipaksa atau dijebak dalam industri ini untuk dipekerjakan dan dieksploitasi (Oryza, 2017).

Keempat, adanya teknologi dan kejahatan terorganisir, dapat diketahui bahwa teknologi memiliki sisi positif dan sisi negatif. Di sisi positif, teknologi dapat mempermudah kehidupan manusia seperti pembayaran, belanja, dll. Sedangkan di sisi negatif, teknologi dapat digunakan sebesar jaringan perdagangan manusia. Jaringan perdagangan manusia menggunakan teknologi untuk merekrut, mengendalikan, dan mengoperasikan perdagangan manusia melalui penipuan daring (online scams). Keberadaan kelompok kejahatan terorganisir di Thailand menjadi basis operasi bagi jaringan perdagangan manusia internasional yang sulit dilacak (Ghifari dan Wibawa, 2021).

Kelima, adanya pengungsi dan pencari suaka, krisis politik di negara-negara seperti Myanmar menyebabkan banyak pengungsi

melarikan diri ke Thailand, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Thailand turut berkontribusi pada tingginya angka perdagangan manusia di negara tersebut. Ketidadaan status hukum yang jelas dan akses terbatas terhadap pekerjaan formal membuat kelompok ini rentan terhadap eksploitasi. Banyak dari mereka terpaksa bekerja di sektor informal dengan kondisi kerja yang buruk dan upah rendah, meningkatkan risiko menjadi korban perdagangan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja informal di Thailand sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi (Sinaga, 2011).

Keenam, Kurangnya penegakan hukum dan perlindungan hukum di Thailand menjadi faktor utama yang memfasilitasi perdagangan manusia. Meskipun pemerintah telah mengesahkan undang-undang anti-perdagangan manusia, implementasinya sering kali tidak konsisten, terutama dalam menindak pelaku dan memberikan perlindungan kepada korban. Meskipun ada kemajuan dalam undang-undang anti-perdagangan manusia, implementasinya sering kali tidak konsisten atau kurang efektif (Khairi, 2021). Kelemahan dalam sistem peradilan, termasuk korupsi dan kurangnya sumber daya, menghambat proses penuntutan dan hukuman bagi pelaku perdagangan manusia. Pejabat yang korup sering kali terlibat dalam perdagangan manusia, baik secara langsung maupun dengan

membiarkan praktik ilegal ini berlangsung. Selain itu, korban sering kali enggan melapor karena takut akan pembalasan atau deportasi, mengingat status hukum mereka yang rentan (Omega dkk, 2023).